



BUDAYA POLITIK DALAM MASYARAKAT PRAGMATIS

Zita Hapsari, Atika Kurnia Aulia, Rahman, Darsih Dahlia, Yohana Neldiana Sari

Universitas Nasional

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Juni 2023

Revised 1 Juli 2023

Accepted 17 July, 2023

Available online 22 July 2023

Kata Kunci:

Budaya, Politik, Pragmati

Keywords:

Culture, Politics, Pragmatic



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Budaya politik adalah sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik dan peran mereka di dalam sistem tersebut. Terdapat beberapa pengertian budaya politik, antara lain budaya politik sebagai aspek politik dari nilai-nilai, doktrin, dan aspek generiknya, hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai, serta bentuk budaya politik yang menyangkut sikap dan norma. Terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif. Budaya politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan. Tipe budaya politik parokial memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, sedangkan budaya politik kaula (subjek) memiliki orientasi politik yang menunjukkan ketergantungan dan pasif terhadap penguasa politik. Budaya politik partisipan, di sisi lain, memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan aktif

dalam proses politik. Budaya politik memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu, sehingga orientasi individu dalam budaya politik dianggap sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

ABSTRACT

Political culture is the characteristically oriented attitude of citizens towards the political system and their role in that system. There are several definitions of political culture, including political culture as the political aspect of values, doctrines, and its generic aspects, the nature and characteristics of political culture concerning values, and the form of political culture concerning attitudes and norms. There are two main components of political culture, namely cognitive orientation and affective orientation. Political culture is divided into three types, namely parochial political culture, subject political culture, and participant political culture. The type of parochial political culture has a very low level of political participation, while the political culture of subjects (subjects) has a political orientation that shows dependence and passivity towards political authorities. Participant political cultures, on the other hand, have high levels of political participation and are active in the political process. Political culture combines two levels of political orientation, namely the system and the individual, so that individual orientation in political culture is considered as an acknowledgment of the existence of phenomena in society as a whole that cannot be separated from individual orientation.

PENDAHULUAN

Secara aplikatif, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Kajian tentang budaya politik selalu menarik. Selain berkaitan dengan perkembangan politik di suatu negara, budaya politik juga berhubungan dengan dinamika partisipasi politik masyarakat. Artinya, perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat (dalam konteks Indonesia) sangat memengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan budaya politik diwujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Partai politik selalu berusaha untuk merebut simpati rakyat dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang partainya dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Agar masyarakat memiliki pandangan politik yang sesuai, sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan yang ada. Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna tetapi kita harus berusaha agar perkembangan budaya politik terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai kepentingan bersama, sehingga masyarakat yang memegang peranan penting dalam perkembangan budaya politik suatu negara mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Berdasarkan pemahaman teoritikal, kita memahami bahwa budaya terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Demikian halnya dengan kebiasaan yang ingin serba praktis dan instan, cepat serta mudah dalam menyelesaikan dan memenuhi segala sesuatu kebutuhan. Kebiasaan tersebut berubah menjadi sebuah budaya pragmatis atau instan.

Budaya serba praktis dan instan di Indonesia kini telah menjadi kebudayaan secara nasional, tidak hanya berjalan di suatu wilayah atau daerah tertentu, namun di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung menggemari sesuatu yang bersifat praktis, dimana masyarakat selalu mementingkan segi kepraktisan dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lebih memilih sesuatu yang dapat diperoleh secara praktis dan instan, dimana tidak merepotkan masyarakat ketika membutuhkan sesuatu. Contohnya, mulai dari jenis makanan, pelayanan, mencapai sesuatu, pemenuhan kebutuhan,

sampai di hampir seluruh aspek kehidupan (termasuk politik) sudah dilingkupi oleh budaya serba instan.³

Mendiskusikan tentang budaya politik menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konteks kekinian di dalam masyarakat. Kecendrungan munculnya sikap pragmatis dalam kehidupan politik menjadi sinyal bahwa realitas politik tidak hanya bicara merebut dan mempertahankan kekuasaan tetapi bagaimana budaya politik yang berkembang di masyarakat disikapi dengan cara pragmatis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan dengan metode studi pustaka. Metode penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sebuah fenomena sosial dan permasalahan pada manusia. Metode atau aspek kemetodean dalam rancangan penelitian kualitatif sebenarnya tidak dituntut untuk dirinci sedemikian rupa. Metode penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mendeskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya politik didefinisikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik di aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.⁴

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik (yang dapat dijadikan sebagai pedoman:

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik memberikan pemahaman rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup,
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Almond, Gabriel dan Sidney Verba, (1999). *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penerjemah (Sahat Simamora), Jakarta : Bumi Aksara
5. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dari pengertian budaya politik yang telah diuraikan, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

Terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective orientations).⁵ Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
3. Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan

Tipe-Tipe Budaya Politik

Tipe-tipe budaya politik dibagi atas budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan.⁶

1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
2. Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
3. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Budaya politik juga merupakan suatu bentuk budaya politik

yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Pragmatisme Politik

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice). Isme berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham/doktrin/gagasan/pernyataan/dsb) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil.

Dengan kata lain, suatu teori itu benar jika berfungsi. Jadi, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran. Kebenaran, menurut James dalam bukunya, *The Meaning of Truth*, adalah sesuatu yang terjadi pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi maka tidak diketahui kebenaran teori itu. Kebenaran akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan pengalaman. Sesuatu yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, paham pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak. Kebenaran ditentukan oleh kemanfaatan. Ide pragmatisme keliru dari tiga sisi. Pertama, pragmatisme mencampurkan kriteria kebenaran ide dan kegunaan praktisnya.

Kebenaran ide adalah suatu hal, sedangkan kegunaan praktis ide itu adalah hal lain. Kebenaran sebuah ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realita atau dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realita. Kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri. Jadi, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi hanya menunjukkan fakta terpenuhinya kebutuhan manusia. Kedua, pragmatisme menafikan peran akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu. Penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah identifikasi naluriah.

Identifikasi naluriah dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan hajatnya, tetapi tidak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Artinya, pragmatisme telah menafikan aktivitas intelektual dan menggantinya dengan identifikasi naluriah. Dengan kata lain, pragmatisme telah menundukkan keputusan akal pada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi naluriah. Ketiga, pragmatisme menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subyek penilai ide --baik individu, kelompok, maupun masyarakat-- serta perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki pragmatisme baru dapat

dibuktikan -- menurut pragmatisme itu sendiri-- setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Ini jelas mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri.

Budaya Politik dan Masyarakat Prgmatis diIndonesia

Bila kita telaah lebih jauh lagi, maka kita dapat menggambarkan budaya politik di Indonesia saat ini sebagai berikut:

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah
2. perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
3. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu sisi masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan non puritanisme dan lain- lain. Kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih bersifat paternalisme dan patrimonial, hal ini masih tercermin dengan berkembangnya fenomena bapakisme atau sikap asal bapak senang.
4. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Selain ketiga hal gambaran budaya politik di tanah air, kita juga dapat mendeskripsikan realitas budaya politik masyarakat:

1. Hirarki yang tegar/ketat. Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masingmasing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
2. Kecendrungan Patronage. Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
3. Kecendrungan Neopatrimonialistik. Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonialistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Merujuk pada realitas yang ada, budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi- fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya.

Budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.

Menurut penelitian yang dilakukan mengenai kinerja birokrasi di beberapa daerah, bahwa birokrasi publik masih mempersepsikan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat dan elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejar status dibandingkan dengan kemakmuran.⁸

Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.

Dalam pandangan Ignas Kleden, terdapat lima preposisi tentang perubahan politik dan budaya politik yang berlangsung sejak reformasi 1998, antara lain:

1. Orientasi Terhadap kekuasaan, Misalnya saja dalam partai politik, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai politik telah membuat partai-partai politik era reformasi lebih bersifat pragmatis.
2. Politik mikro vs politik makro, Politik Indonesia sebagian besar lebih berfokus pada politik mikro yang terbatas pada hubungan- hubungan antara aktor-aktor politik, yang terbatas pada tukar- menukar kepentingan politik. Sedangkan pada politik makro tidak terlalu diperhatikan dimana merupakan tempat terjadinya tukar menukar kekuatan-kekuatan sosial seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society, dan sebagainya
3. Kepentingan negara vs kepentingan masyarakat, Realitas politik lebih berorientasi pada kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat.
4. Desentralisasi politik, Pada kenyataannya yang terjadi bukanlah desentralisasi politik, melainkan lebih pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis. Hal ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

Kesimpulan

Budaya politik adalah sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik dan peran mereka di dalam sistem tersebut. Terdapat beberapa pengertian budaya politik, antara lain budaya politik sebagai aspek politik dari nilai-nilai, doktrin, dan aspek generiknya, hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai, serta bentuk budaya politik yang menyangkut sikap dan norma. Terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif. Budaya politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan. Tipe budaya politik parokial memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, sedangkan budaya politik kaula (subjek) memiliki orientasi politik yang menunjukkan ketergantungan dan pasif terhadap penguasa politik. Budaya politik partisipan, di sisi lain, memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan aktif dalam proses politik. Budaya politik memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu, sehingga orientasi individu dalam budaya politik dianggap sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

DAFTAR REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture Revisited*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba, (1999). *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penerjemah (Sahat Simamora), Jakarta : Bumi Aksara.
- Cambridge University Press.
- Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and*
- Dalton, R. J., & Welzel, C. (Eds.). (2014). *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*. Cambridge University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk, (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Yogyakarta.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
- Jackson, Karl D, 1978. *The Political Implications of Structure and Culture in Indonesia*, California : University of California.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Ryass, Muhammad, 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya.
- Siregar, Amir Efendi (ed.), 1991. *Arus Pemikiran Ekonomi Politik : Esai- Esai Terpilih*, Yogyakarta : Tiara Wacana.